

LATAR BELAKANG KERJASAMA INDONESIA-JEPANG MENGELOLA 6 PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA DALAM SKEMA *INDONESIA-JAPAN MARITIME FORUM (IJMF)*

ABSTRAK

Seiring dengan pentingnya keberadaan pulau-pulau terluar, Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk bekerja sama dalam skema Indonesia-Jepang Maritim Forum (IJMF). Dalam kerjasama ini, Jepang memberikan hibah uang untuk membangun dan memberdayakan potensi pulau-pulau terluar Indonesia yang terpilih, yaitu pulau Sabang, Natuna, Morotai, Biak, Moa dan Saumlaki. Melibatkan dana asing dalam mengelola wilayah Indonesia sebenarnya adalah hal yang kontroversi, apalagi wilayah tersebut adalah pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara asing. Dana asing yang mengalir ke suatu negara meski dalam bentuk hibah tentu akan berdampak pada negara penerima. Disini faktanya Indonesia telah menerima kerjasama ini. Berdasarkan fakta penerimaan kerja sama dalam bentuk hibah uang dan fasilitas perikanan guna memaksimalkan pengelolaan di 6 pulau terluar Indonesia, penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan apakah latar belakang Pemerintah Indonesia menerima kerjasama ini. Mengingat bahwa dana yang disalurkan oleh Jepang sebagai negara donor akan mengalir ke wilayah perbatasan Indonesia, bukankah perbatasan merupakan wilayah sensitif karena mereka rentan terhadap pengaruh asing?, dan bukankah pulau terluar memiliki peran penting bagi kedaulatan Indonesia?, maka adalah logika terbalik jika Indonesia dengan serta merta melibatkan Negara Asing dalam rangka mengembangkan potensi 6 pulau terluarnya. Terlebih lagi, telah diketahui bahwa bantuan asing tidak hanya sebatas pemberian dana dari negara donor kepada negara penerima. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu politik tepatnya dengan teori pengambilan keputusan oleh Richard Snyder.

Kata kunci: *Bantuan Luar Negeri, Pengambilan Keputusan, Ekonomi Politik dan Pertahanan Wilayah Perbatasan.*